

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

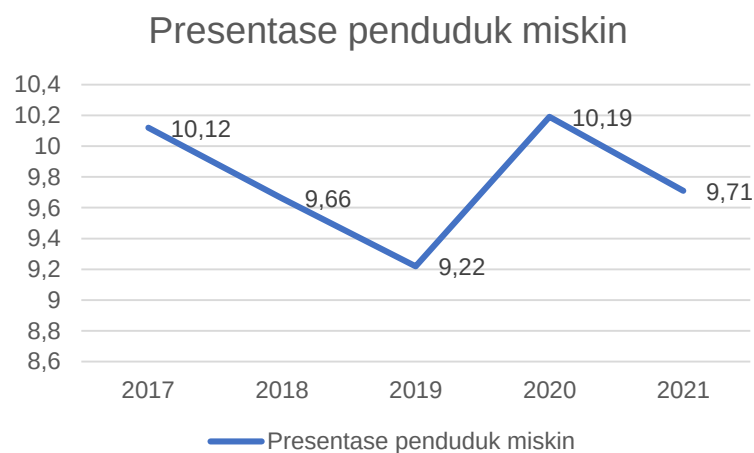
Kemiskinan merupakan masalah utama di banyak negara di dunia, kemiskinan juga merupakan permasalahan yang di hadapi di negara berkembang terutama pada Negara Indonesia. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pokok maupun non pokok. Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai: a) kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya (pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, trnsportasi dan sanitasi) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat, b) ketidaktentraman hidup, c) ketidakberdayaan, dan d) ketidakmampuan menyalurkan aspirasinya.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Negara Indonesia memiliki jumlah 17.504 pulau yang termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan jumlah pulau yang begitu banyak Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 270.203.917 jiwa yang tersebar di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Banyaknya penduduk Indonesia menyebabkan tingkat kemiskinan yang dialami cukup tinggi.

Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 26,50 juta jiwa di Indonesia. Terhitung pada periode September 2017 sampai September 2019 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin secara berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 26,58 juta jiwa,

tahun 2018 sebanyak 25,67 juta jiwa, dan pada tahun 2019 sebanyak 24,78 juta jiwa, dengan data yang telah diperoleh dapat dinyatakan pemerintah Indonesia mampu dan berhasil dalam melakukan upaya penekanan masalah sosial dalam hal kemiskinan. Sementara itu, kenaikan jumlah penduduk miskin pada periode September 2020 yang berjumlah sebanyak 27,55 juta jiwa disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Negara Indonesia. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dengan total sebanyak 26,50 juta jiwa. Sementara itu, persentase kemiskinan di Indonesia dalam periode 2017- 2021 disajikan pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.1 Presentase Kemiskinan di Indonesia



Gambar 1.1 Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021-2022

Dilihat dari Gambar 1.1 berdasarkan data presentase jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mengalami penurunan secara bertahap yaitu sebanyak 0,9% persen, penurunan tersebut dapat dilihat pada periode 2017 sebanyak 10,12 dan menjadi 9,22 persen pada tahun 2019. Meskipun data menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, tetapi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Negara Indonesia sehingga upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin belum tercapai secara maksimal.

Sebagai pulau yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi di Indonesia, Pulau Jawa memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode September 2021 jumlah penduduk miskin paling banyak berkumpul di Pulau Jawa. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (14,02 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,98 juta orang).

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia

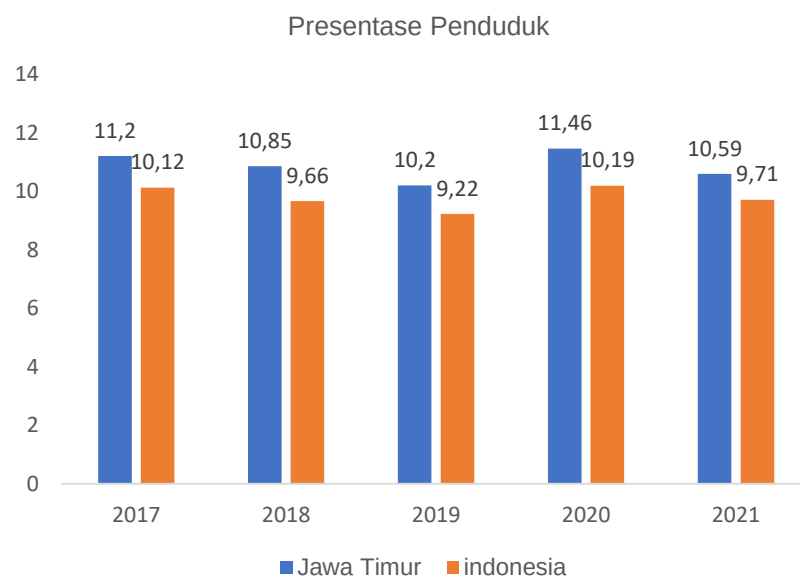


Gambar 1.2 Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021

Dilihat dari Gambar 1.2 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada September 2021. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,43 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,85 persen. Pulau Kalimantan juga termasuk kedalam pulau yang memiliki penduduk miskin terendah dari sisi jumlah (0,98 juta orang), sedangkan Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak sebesar (14,02 juta orang).

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar setelah Provinsi Jawa Barat memiliki ketimpangan terhadap jumlah penduduk miskin. Ketimpangan tersebut terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan, terutama dengan penduduk berstrata ekonomi rendah serta memiliki pendidikan yang rendah. Dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Timur tingkat kemiskinannya tinggi pula seperti yang dipaparkan pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Indonesia, Pada Tahun 2017-2021



Gambar 1.3 Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, persentase penduduk miskin Jawa Timur dan Indonesia tahun 2017 sampai 2019 memiliki tren penurunan, namun penurunan Provinsi Jawa Timur masih terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dalam skala Indonesia.

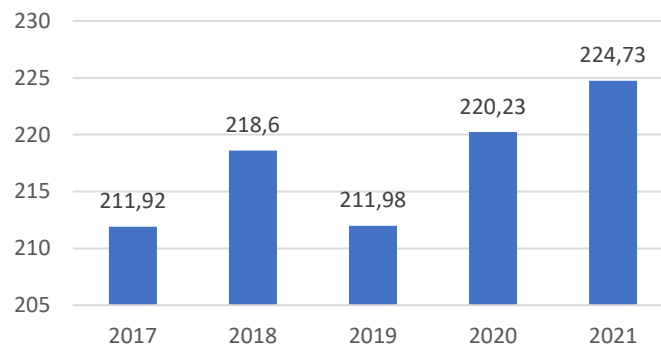
Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah serius yang harus segera di selesaikan. Kemiskinan di daerah merupakan faktor yang berkontribusi

pada kemiskinan nasional sehingga perlu adanya penanggulangan kemiskinan melalui daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Daerah yang memiliki penduduk miskin salah satunya adalah Jawa Timur. Jawa Timur pada tahun 2021 memiliki tingkat kemiskinan 11,40 persen data yang diambil dari BPS. Salah satu kabupaten yang memiliki kontribusi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan 20,51 persen pada tahun 2021.

Kabupaten Sumenep secara geografis merupakan daerah daratan dan daerah lautan. Dengan letak geografis tersebut Kabupaten Sumenep memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun Kabupaten Sumenep masih merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Hal tersebut sejalan menurut Badriyah (2022) meskipun memiliki potensi sumber daya kawasan pesisir yang cukup melimpah, namun sebagian besar dari masyarakat pesisir hidup dalam kondisi subsisten atau miskin. Menurut Fanesa Fargomeli (2014) dengan kekayaan laut yang sangat melimpah tentunya masyarakat Indonesia bisa sejahtera dan berkembang menjadi masyarakat nelayan yang maju dikarenakan kekayaan alam yang melimpah. Namun pada kenyataannya masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir dan yang mengandalkan sumber daya alam sebagai penghidupannya tidak terlepas dari masalah sosial, ekonomi dan politik.

Tingginya angka kemiskinan menjadikan masalah kemiskinan sebagai salah satu fokus pada suatu daerah. Menurut data terakhir persentase penduduk miskin di Jawa Timur mengalami peningkatan pada Kabupaten Sumenep juga mengalami peningkatan. Peningkatan angka kemiskinan wilayah Kabupaten Sumenep selama lima tahun terakhir dipaparkan pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumenep, Pada Tahun 2017-2021



Gambar 1.4 Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik diatas jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2017 sampai 2021. Dalam grafik diatas jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep mengalami fluktuasi dimana upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut belum maksimal. Pada Kabupaten Sumenep presentase kemiskinan masih berada diatas Provinsi Jawa Timur. Artinya, Kabupaten Sumenep berkontribusi penuh pada angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih kurang baik pada daerah yang berada pada tingkat kemiskinan tersebut.

Tindakan pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan sangat serius salah satunya adalah program bantuan pangan di Kabupaten Sumenep. Di Madura sendiri program bantuan sosial dalam bentuk bantuan pangan diselenggarakan di ke empat kabupaten yang ada di Madura. Kabupaten yang memiliki realisasi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dan anggaran bantuan

sosial yang menempati urutan tertinggi di Madura adalah Kabupaten Sumenep. Jumlah bantuan sosial di Madura pada 2021 dipaparkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dan anggaran bantuan sosial 2021

Kabupaten	Realisasi Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan	Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan (Rp)
Sumenep	127 470	327 859 800 000
Pamekasan	100 345	278 094 400 000
Bangkalan	87 241	225 260 000 000
Sampang	84 604	223 637 600 000

Tabel 1. 1 Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021

Dilihat dari Tabel 1.1 berdasarkan data jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) menurut kabupaten di Pulau Madura pada tahun 2021. Terlihat bahwa jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terbanyak berada di Kabupaten Sumenep yaitu sebanyak 127.470. Sementara itu, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terendah berada di Kabupaten Sampang, yaitu sebesar 84 604. Kabupaten Sumenep juga termasuk kabupaten yang memiliki realisasi anggaran bantuan sosial pangan terbesar dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 327 859 800 000, sedangkan Kabupaten Sampang merupakan kabupaten yang memiliki realisasi anggaran bantuan sosial pangan terendah dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 223 637 600 000.

Penduduk miskin menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya hasil

pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Peran pemerintah dalam mengelola persediaan dalam hal pangan yang memadai dan pangan dengan mutu yang baik serta cocok dengan ke sanggupan warga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Kondisi warga Indonesia yang mengalami perkara kemiskinan serta kerawanan pangan, biasanya karena banyak warga miskin yang memiliki penghasilan rendah. Di Indonesia sendiri pada kenyataannya tidak semua masyarakatnya sanggup memenuhi keperluan akan pangannya sendiri hal tersebut dikarenakan oleh kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang masih melanda negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia termasuk masalah kemiskinan.

Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program yang ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia. Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat adalah program Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberi nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kemudian dari penelitian terdahulu tentang Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Rumah tangga Petani di Kota Jambi oleh Herviyanti et al, (2021) menyimpulkan bawasannya berdasarkan analisis deskriptif dan inferensial pengaruh pendampingan ahli terhadap kesejahteraan petani bantuan pangan non tunai di kota Jambi diketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Bantuan pangan non tunai petani di kota Jambi Hal ini terlihat dari indikator-indikator kesejahteraan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik terdiri dari beberapa indikator yaitu pendapatan, pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan indikator kondisi fisik perumahan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap dengan adanya program penanggulangan kemiskinan ini dapat mengurangi kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap penerima bantuan pangan di Kabupaten Sumenep yang diharapkan dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat mereduksi masalah kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Hal tersebut sejalan dengan PERMENSOS NOMOR 20 TAHUN 2019 pasal 2 ayat 2 tentang Manfaat BPNT untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus

sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu bagaimana dampak bantuan pangan terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui dampak bantuan pangan terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan yaitu dengan adanya peneliti ini maka dapat memberikan masukan dari berbagai pihak khususnya kepada penyelenggara program bantuan pangan di kabupaten sumenep. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan seperti yang diharapkan oleh masyarakat untuk menekankan angka kemiskinan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian ataupun penelitian selanjutnya yang terkait bantuan pangan bagi rumah tangga dan diharapkan dapat membuka wacana baru bagi para peniliti-peneliti selanjutnya agar semakin antusias dalam mengurangi kemiskinan.